

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mendorong Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan dokumen perencanaannya.

Terbitnya kebijakan di bidang pemerintahan di atas melahirkan konsekuensi timbulnya perubahan kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga pemerintahan di Pusat dan Daerah. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang berdampak pada perubahan beban dan karakteristik tugas.

Dengan demikian, dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, perlu menyesuaikan kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penataan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah, sarana dan prasarana serta perangkat pelayanan umum secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi.

Selaras dengan otonomi daerah yang salah satu tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan (*services provider*) kepada masyarakat sebagai penerima layanan (*services recipient*), sudah selayaknya diambil langkah-langkah perbaikan pelayanan umum terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas aparatur pemerintah secara profesional dan deregulasi kebijakan di bidang pelayanan umum. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh masyarakat.

Dengan meningkatkan kualitas pelayanan umum di Daerah, maka citra dan wibawa aparatur pemerintah daerah di masyarakat akan meningkat. Di samping aspek tersebut, tingkat persaingan di era globalisasi ini semakin tajam di berbagai sektor. Kondisi demikian menuntut ditingkatkannya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam menghadapi era globalisasi, salah satu komponen Pemerintah Daerah yang perlu segera dibenahi adalah karakter, budaya dan kondisi disiplin aparatur pemerintah. Artinya, semakin baik pelayanan yang dapat dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka semakin baik citra aparatur pemerintah itu sendiri.

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Daerah Kota Malang yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, berperan memberikan dukungan melalui perumusan kebijakan dan mengkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2023 berisi rencana subkegiatan, kegiatan, program dan sasaran tahunan yang hendak dicapai Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2023. Perubahan Rencana subkegiatan, kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2023 ini merupakan kelanjutan dari kegiatan, program, dan sasaran tahunan Sekretariat Daerah Kota Malang.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- j. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
- n. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025;
- o. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
- p. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- q. Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023;
- s. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- t. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi sarana akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan adalah untuk memastikan penjabatan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta sasaran penerima manfaat sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Triwulan Tahun 2023
2. Review Terhadap Renja Setda Tahun 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 telah dilakukan evaluasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Hasil reuiu terhadap hasil evaluasi, sebagaimana dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Realisasi program/kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sama sekali belum terpenuhi (capaian 0%)
Adapun program/kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sama sekali belum terpenuhi (capaian 0%) adalah:
 - a. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Program Perekonomian Dan Pembangunan), sama sekali belum tercapai atau terealisasi sebesar 0%.
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Program Perekonomian Dan Pembangunan), sama sekali belum tercapai atau terealisasi sebesar 0%.
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), sama sekali belum tercapai atau terealisasi sebesar 0%.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), sudah terealisasi sebesar 100% dari target Renja sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) sudah terealisasi sebesar 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang capaian target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan masih di bawah 100%

Untuk tahun 2022, program/kegiatan yang capaian target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan masih di bawah 100% adalah:

- a. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), baru dapat terealisasi sebesar 37,81%.
- b. Kegiatan Penataan Organisasi (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), hanya dapat terealisasi sebesar 20%.
- c. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), baru terealisasi sebesar 55,50%.
- d. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), baru terealisasi sebesar 35%.
- e. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Program Perekonomian dan Pembangunan), baru terealisasi sebesar 73,33%.
- f. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), baru terealisasi sebesar 50%.
- g. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), baru terealisasi sebesar 69,89%.
- h. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota), sudah terealisasi sebesar 35,20%.
- i. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) sudah terealisasi sebesar 50%.
- j. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) baru terealisasi sebesar 67,23%.
- k. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) baru terealisasi sebesar 53,16%.
- l. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) baru terealisasi sebesar 49,73%.
- m. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota) baru terealisasi sebesar 49,67%.

- n. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), baru terealisasi sebesar 14,29%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya kinerja program/kegiatan
Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya atau terpenuhinya kinerja program/kegiatan adalah:
 - a. Program/kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada triwulan III dan IV, sehingga belum nampak pelaksanaannya pada triwulan I dan II.
 - b. Program/kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2023 sehingga capaian pada triwulan I dan II belum optimal dan belum menggambarkan capaian keseluruhan tahun 2023.
 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capainya program Renstra Sekretariat Daerah, maka pada tahun 2023 perlu dilakukan:
 - a. Melakukan reviu terhadap indikator dan target yang telah ditetapkan;
 - b. Melakukan reviu terhadap capaian kinerja dan melakukan penyempurnaan terhadap program dan kegiatan;
 - c. Merencanakan dan menganggarkan kegiatan yang mendukung program yang selaras dengan Renstra.

Adapun pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 sampai dengan Triwulan II tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TABEL 2.1
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sekretariat Daerah
Periode Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16	
1	Meningkatnya kualitas kebijakan manajemen pemerintahan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Ketercapaian SPM	3,000	1.757.536.595	-	413.111.420		24%		(outcome)			Bagian Pemerintahan	
			Prosentase penyusunan laporan dan LPPD yang tepat waktu						55,50%						Bagian Pemerintahan
				1 dokumen	30.000.000	2 dokumen	5.227.000	100%	17%						Bagian Pemerintahan

		Penataan Administrasi Pemerintahan	- Jumlah dokumen administrasi walikota, wakil walikota, dan anggota DPRD yang difasilitasi dan jumlah dokumen pelaksanaan hari jadi daerah	4 dokumen	137.900.000	2 dokumen	3.039.000	50%	2%					Bagian Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen batas daerah, jumlah dokumen pembakuan dan penamaan rupabumi, jumlah laporan kegiatan lembaga kecamatan, jumlah dokumen fasilitas	5 dokumen	980.058.800	3 dokumen	139.435.520	6%	14%					Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen LKPJ Walikota, Jumlah dokumen LPPD, Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, jumlah dokumen RLPPD, jumlah laporan pelaksanaan	5 dokumen	464.878.995	4 dokumen	259.373.700	66%	56%					Bagian Pemerintahan
		Fasilitasi Kerja Sama dalam negeri	Jumlah dokumen Kerja sama	20 dok	144.698.800	7 dokumen	6.036.200	35,00%	4%					Bagian Pemerintahan
2.	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase pengembangan kebijakan hukum yang ditindaklanjuti	100%	3.366.977.434	0,00%	956.253.566	0,00%	28,40%					Bagian Hukum

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	16 dokumen	3.366.977.434	16 dokumen	956.253.566	37,81%	28,40%					Bagian Hukum
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1. Jumlah dokumen usulan program pembentukan Perda dari Pemerintah Kota Malang	5 dokumen	1.119.280.000	2 dokumen	206.817.974	40,00%	18,48%					Bagian Hukum
	2. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting	0		0 dokumen	-	0,00%						Bagian Hukum
	3. Jumlah produk hukum daerah yang disusun	0		0 dokumen	-	0,00%						Bagian Hukum
	4. Jumlah produk hukum yang disusun	0		0 dokumen	-	0,00%						Bagian Hukum
	5. Jumlah rancangan produk hukum yang di fasilitasi	590 dokumen		365 produk hukum	-	61,86%						Bagian Hukum
Fasilitasi Bantuan Hukum	1. Jumlah dokumen hasil fasilitasi permasalahan hukum	1 dokumen	1.403.967.434	1 dokumen	541.842.172	100,00%	38,59%					Bagian Hukum
	2. Jumlah dokumen laporan fasilitasi	2 dokumen		0 dokumen		0,00%						Bagian Hukum
	3. Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	43 kasus		0 kasus		0,00%						
	4. Jumlah peserta bimbingan teknis	0		0		0,00%						Bagian Hukum

		5. Jumlah sidang penegakan hukum daerah	11 sidang		5 sidang		45,45%							Bagian Hukum
		6. Jumlah sidang perkara di Badan Peradilan	150 sidang		361 sidang		240,67%							Bagian Hukum
	Pendokumentasi an Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1. Jumlah buku himpunan perda yang dicetak	0	843.730.000	0	207.593.420	0,00%	24,60%						Bagian Hukum
		2. Jumlah peserta pembinaan kadarkum	300 orang		0		-	0,00%						Bagian Hukum
		3. Jumlah peserta penyampaian informasi peraturan daerah	500 orang		110 orang		-	22,00%						Bagian Hukum
		4. Jumlah peserta penyuluhan hukum	500 orang		186 orang		-	37,20%						Bagian Hukum
		5. Jumlah produk hukum dan pengelolaan Informasi hukum yang didokumentasi	24 dokumen		8 dokumen		-	33,33%						
		6. Jumlah produk hukum yang didigitalisasi	4 dokumen		2 dokumen		-	50,00%						Bagian Hukum
		7. Jumlah rekomendasi perubahan perda dan perwal	10 produk hukum		5 produk hukum		-	50,00%						Bagian Hukum
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	15.595.300.000	0,12%	7.024.261.000		45,04%		7.024.261.000		45,04%	Bagian Kesra	

		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	17 dok	15.595.300.000	1	7.024.261.000	14,29%	45,04%	1	7.024.261.000		45,04%	Bagian Kesra
		Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen evaluasi dan kebijakan kesejahteraan sosial	4 dok	4.649.640.000	-	1.916.431.000	-	41,22%	-	1.916.431.000		41,22%	Bagian Kesra
		Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi dan kebijakan Kesejahteraan masyarakat	6 dok	5.966.360.000	-	2.651.160.000	-	44,44%	-	2.651.160.000		44,44%	Bagian Kesra
		Sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen fasilitas pengelolaan bina mental spiritual	7 dok	4.979.300.000	1 dokumen	2.456.670.000	14,29%	49,34%	1	2.456.670.000		49,34%	Bagian Kesra
3.	Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase paket selesai tender	100%	1.969.497.000	-	981.815.719							BLPBJ
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	100%	1.969.497.000		981.815.719	73,33%	126,11		2.269.428.703	299	316,62	BLPBJ
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang/jasa	200 dok.	460.310.000,00	46 dok	20.625.993	23,00%	23,00%	198 dok	364.382.480	99	79,16	BLPBJ

4.		Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	7 dok.	300.000.000,00	0 dok	185.083.913	0,00%	61,69	1624 lay+7 dok	318.841.719	100	106,28	BLPBJ
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	700 orang	1.209.187.000,00	1379 orang	776.105.813	197,00%	64,18	295 lay+1379 orang	1.586.204.504	100	131,18	BLPBJ
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100	1.328.320.905	15,71	208.670.000	0,16	0,16	116	609.053.120	1,16	0,15	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian	2	846.424.000	12,93	171.794.500	646,66%	0,20	15	430.582.600	4,98	0,17	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan evaluasi Program Pembangunan	1	100.000.000	1,07	14.196.000	106,87%	0,14	2	80.056.000	2,07	0,27	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	1	381.896.905	1,71	22.679.500	170,74%	0,06	3	98.414.520	2,71	0,09	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA
5.	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Hasil Survei Internal Organisasi	2,3	1.423.396.100	0	641.461.831	0	45,07%	0	641.461.831	0%	24,47%	Bagian Organisasi

6.	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah	44	-	0	-	0%	0,00%	0%	-	0%	0,00%	Bagian Organisasi	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	107.471.400	1 dokumen	105.341.260	100%	98,02%						Bagian Organisasi
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	107.471.400	2 dokumen	105.341.260	100%	98,02%						Bagian Organisasi
		Kegiatan Penataan Organisasi	15 dokumen	1.315.924.700	2 dokumen	536.120.571	20%	40,74%						Bagian Organisasi
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 dokumen	336.909.100	0 dokumen	139.580.289	0%	41,43%						Bagian Organisasi
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	55.989.000	1 laporan	28.187.912	0%	50,35%						Bagian Organisasi
		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	547.138.600	0 dokumen	97.766.932	0%	17,87%						Bagian Organisasi
		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	263.028.500	0 dokumen	215.397.938	0%	81,89%						Bagian Organisasi

		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dokumen	112.859.500	1 dokumen	55.187.500	100%	48,90%					Bagian Organisasi
7.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	100,00%	10.006.795.993,00	37,04%	4.665.539.701,00	37,04%	46,62%					Bagian Humas
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	27 laporan	10.006.795.993,00	10 laporan	4.665.539.701,00	37,04%	46,62%					Bagian Humas
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	11 laporan	423.451.200,00	4 laporan	138.600.000,00	36,36%	32,73%					Bagian Humas
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 laporan	8.971.796.793,00	5 laporan	4.495.539.701,00	41,67%	50,11%					Bagian Humas
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 laporan	611.548.000,00	1 laporan	31.400.000,00	25,00%	5,13%					Bagian Humas
8.	Meningkatnya kinerja pelayanan Sekretariat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			71.732.255.623		24.790.125.466		34,56%		131.675.705.149		76,94%	Bagian Umum Setda Kota Malang
			Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	28.614.493.553	0,00%	10.935.082.685	0,00%	38,22%	100,00%	58.555.170.592		70,85%	
			Nilai survey kepuasan internal	80,00	26.133.464.365	0,00%	7.975.243.301	0,00%	30,52%	80,00	42.737.198.978		79,80%	

		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	16.984.297.705	77,50%	5.879.799.480	96,88%	34,62%	78,75%	30.383.335.579		86,94%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	26.359.493.553	0,00%	9.977.371.611	#VALUE !	37,85%	100,00%	56.307.642.662	71,41%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang / bulan	26.196.583.036	150 orang / bulan	9.962.468.391	150 orang / bulan	38,03%	150 orang / bulan	55.441.650.087	71,70%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	162.910.517	0 laporan	14.903.220	0,00%	9,15%	2 laporan	865.992.575	57,04%
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	376.470.000	82,5 %	-	0,00%	0,00%	91,25 %	337.578.520	28,56%
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50 dokumen	310.000.000	0 laporan	-	0,00%	0,00%	31 laporan	196.788.520	42,85%
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000	0 laporan	-	0,00%	0,00%	0 laporan	-	0,00%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	16.470.000	0 laporan	-	0,00%	0,00%	2 laporan	140.790.000	27,45%

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100%	242.740.000	75,00%	75.820.000	50,00%	31,24%	175,00%	603.643.000		55,84%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	78.380.000	2 paket	75.820.000	100,00%	96,73%	5 paket	444.305.000		88,86%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 orang	164.360.000	0 orang	-	0,00%	0,00%	50 orang	159.338.000		27,42%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	8.781.871.820	47,09%	3.062.481.636	67,23%	34,87%	73,55%	19.257.320.908		85,28%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 paket	250.230.000	0 paket	-	0,00%	0,00%	85 paket	423.900.500		63,30%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	330.000.000	60 paket	313.850.110	100,00%	95,11%	267 paket	1.304.527.064		89,85%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	100.000.000	26 paket	88.309.824	86,67%	88,31%	111 paket	330.426.730		80,50%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	142.920.000	3 paket	23.625.000	20,00%	16,53%	23 paket	149.085.300		59,16%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32 paket	287.644.500	30 paket	191.368.800	93,75%	66,53%	97 paket	716.174.390		65,19%

	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 paket	55.000.000	27 paket	12.137.890	90,00%	22,07%	62 paket	64.154.555		61,10%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1000 laporan	7.016.382.320	714 laporan	2.214.233.551	71,40%	31,56%	2736 laporan	15.156.885.333		94,73%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	599.695.000	152 laporan	218.956.461	76,00%	36,51%	516 laporan	1.112.167.036		42,87%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 %	10.887.134.243	66,67%	4.072.747.500	53,16%	37,41%	80,00%	18.620.111.279		94,04%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	4.023.700.000	4 unit	3.154.820.000	100,00%	78,41%	18 unit	8.071.540.000		94,96%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	856.947.200	137 unit	185.806.000	91,33%	21,68%	143 unit	525.167.345		75,02%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43 unit	3.795.177.043	4 unit	466.091.500	9,30%	12,28%	54 unit	8.146.895.460		94,73%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	2.211.310.000	3 unit	266.030.000	12,00%	12,03%	36 unit	1.876.508.474		93,83%

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	12.977.141.617	100%	3.313.176.316	49,73%	25,53%	100%	16.336.650.896		78,19%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	39.315.000	6 laporan	10.800.000	50,00%	27,47%	30 laporan	302.563.000		75,64%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	2.534.000.000	18 laporan	973.458.416	50,00%	38,42%	90 laporan	4.178.349.396		68,85%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 laporan	6.471.800.000	98 laporan	691.895.000	49,00%	10,69%	430 laporan	5.611.301.500		97,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1116 laporan	3.932.026.617	557 laporan	1.637.022.900	49,91%	41,63%	584 laporan	6.244.437.000		72,27%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	5.720.693.462	44,81%	1.807.051.980	49,67%	31,59%	62,40%	11.425.645.780		81,82%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	145.876.450	2 unit	32.230.000	100,00%	22,09%	6 unit	210.984.630		84,39%

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	2.905.099.548	72 unit	1.138.193.280	72,00%	39,18%	280 unit	6.116.497.975		86,16%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	105.920.000	0 unit	-	0,00%	0,00%	6 unit	29.410.000		14,00%
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	8 unit	1.599.000.000	4 unit	489.291.495	50,00%	30,60%	23 unit	4.029.661.220		89,55%
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	100 unit	680.872.464	46 unit	71.052.080	46,00%	10,44%	64 unit	732.606.580		47,13%
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	50 unit	283.925.000	15 unit	76.285.125	30,00%	26,87%	19 unit	306.485.375		87,57%

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100%	2.255.000.000	62,50%	957.711.074	100,00%	42,47%	81,25%	2.247.527.930		59,20%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang / bulan	1.255.000.000	2 orang / bulan	461.380.074	100,00%	36,76%	2 orang / bulan	814.662.444		45,70%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang / bulan	1.000.000.000	2 orang / bulan	496.331.000	100,00%	49,63%	2 orang / bulan	1.432.865.486		71,16%
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitas layanan kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100%	4.131.710.928	61,81%	1.523.765.349	69,89%	36,88%	80,90%	6.539.584.174		72,66%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	29 paket	2.045.386.988	24 paket	925.566.693	82,76%	45,25%	74 paket	3.911.031.555		78,22%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitas layanan kerumahtanggaan wakil kepala daerah	28 paket	1.167.356.500	15 paket	418.511.821	53,57%	35,85%	54 paket	1.719.402.660		57,31%

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	918.967.440	11 paket	179.686.835	73,33%	19,55%	27 paket	909.149.959		90,91%
--	--	--	----------	-------------	----------	-------------	--------	--------	----------	-------------	--	--------

2.2 Review Terhadap Renja Setda Tahun 2023

Renja Setda Tahun 2023 sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RKPD dalam perjalanannya mengalami perubahan pagu anggaran. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan target kinerja yang diharapkan baik itu pengurangan pagu anggaran maupun penambahan pagu anggaran. Disamping itu proses ini menyesuaikan plafon anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Adapun review terhadap Review Terhadap Renja Setda Tahun 2023 Kota Malang di lingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
ANALISA KEBUTUHAN PERUBAHAN ANGGARAN

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (S.D. TRIWULAN II)							HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	KINERJA		PAGU (Rp)		Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Perubahan Anggaran	Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Hukum	Persentase Pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	100%		3.366.977.434		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti				
I.1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku	500 kali		3.366.977.434		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku		4.940.817.434		
I.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	471 dokumen		1.119.280.000		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	471 dokumen	1.392.800.000	kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek Legal Drafting	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	43 kasus		1.403.967.434		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	43 kasus	2.203.967.434	kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan HAM dan perkara di PN SBY perkara Niaga	

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Bagian Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	6 dokumen		843.730.000		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	6 dokumen	1.344.050.000	kebutuhan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Diseminasi Perda dan Cetak Buku Himpunan Perda TA 2022	
II	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	-	15.595.300.000		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti				
II.1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	18 dokumen		15.595.300.000		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat		15.795.300.000		
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dokumen		4.979.300.000		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 dokumen	4.979.300.000		

2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 dokumen		4.649.640.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 dokumen	4.649.640.000		
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Bagian Kesra dan Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 dokumen		5.966.360.000		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 dokumen	6.166.360.000		
III	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Pemerintahan	Persentase Ketercapaian IKK	80%		1.757.536.595		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Ketercapaian IKK	80%	1.757.536.595		

			Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%					Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%			
III.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	15 dokumen		1.727.536.595		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	15 dokumen	1.766.609.795		
III.2	Penataan Administrasi Pemerintahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 dokumen	2 dokumen	137.900.000		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 dokumen	137.900.000		
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 dokumen	3 dokumen	980.058.800		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 dokumen	980.058.800		
III.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	4 dokumen	464.878.995		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	464.878.995		
III.5	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	20 dokumen		144.698.800		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerjasama dalam negeri	20 dokumen	183.772.000		
III.6	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah Dalam Negeri	20 Dokumen	7 dokumen	144.698.800		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	183.772.000		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Pemerintahan	Nilai Ketercapaian SPM	3,000				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai EKPPD Pemerintah Kota Malang				

III.7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Pemerintahan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen		30.000.000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	-			
III.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bagian Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	-			
IV	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Pemerintahan, Organisasi, Umum	Hasil Survei Internal Organisasi	2,3				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Hasil Survei Internal Organisasi					
IV.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	104.471.400	105.341.260	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan					
IV.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	104.471.400	105.341.260	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja Setda					
	Penataan Organisasi	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi sesuai ketentuan	15 dokumen	5 dokumen	1.315.924.700		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen penataan organisasi sesuai ketentuan					

IV.4	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3 dokumen	2 dokumen	336.909.100	139.580.289	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kebijakan bidang kelembagaan				
IV.5	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	5 laporan	1 laporan	55.989.000	28.187.912	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik				
IV.6	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	3 dokumen	0 dokumen	547.138.600	97.766.932	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil monev RB				
IV.7	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	3 dokumen	1 dokumen	263.028.500	215.397.938	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monev pelayanan publik				
IV.8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 dokumen	1 dokumen	112.859.500	55.187.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kota Malang				
V	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100%		1.308.320.905		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100%	1.328.320.905		
V.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian	2 Dokumen		826.424.000	171.794.500	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian	2 dokumen	846.424.000		
V.2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 dokumen		308.321.700	91.940.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 dokumen	308.321.700	Untuk mendukung rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas BLUD	Pergeseran belanja honorarium narasumber, moderator, pembawa acara, dan panitia ke

													belanja jasa event
													Pergeseran belanja jasa tenaga ahli ke belanja jasa event
													Pergeseran belanja perjalanan dinas biasa ke jasa event
													Pergeseran belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor/ATK ke belanja jasa event
V.3	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan		518.102.300	79.854.500	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	538.102.300	Efektivitas penyusunan kajian agar lebih fokus dan terarah sesuai kebutuhan	Pergeseran belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor/ATK ke belanja jasa konsultansi non konstruksi
													Pergeseran belanja jasa tenaga ahli ke belanja jasa konsultansi non konstruksi
													Pergeseran belanja honorarium tim pelaksana kegiatan ke belanja jasa konsultansi non konstruksi

												Mendukung pelaksanaan kegiatan monev TPID	Penambahan belanja barang rompi petugas lapangan
V.4	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi	1 Dokumen		100.000.000	14.196.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi	1 dokumen	100.000.000		
V.5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan		100.000.000	14.196.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	100.000.000	Efektivitas penyerapan anggaran untuk meminimalisir terjadinya SILPA anggaran	1. Pergeseran belanja barang pakai habis (benda pos) ke belanja perjalanan dinas biasa 2. Pergeseran belanja jasa kantor (honorarium narsum) ke belanja perjalanan dinas biasa
V.6	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA	2 Dokumen		381.896.905	22.679.500	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA	1 dokumen	381.896.905		

V.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen		281.896.905		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen	281.896.905		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 dokumen		100.000.000	22.679.500	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 dokumen	100.000.000	Untuk mendukung rencana pelaksanaan sosialisasi LPG 3kg bersubsidi	Menambah belanja perjalanan dinas biasa ke belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota
VI	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Persentase paket selesai tender	95%	95%	1.969.497.000	981.815.719	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	95%	1.969.497.000		
VI.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	100%	100%	1.969.497.000	981.815.719	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	1.969.497.000		
VI.2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Jumlah dokumen hasil proses pengadaan barang/jasa	200 dokumen	46 dokumen	460.310.000	20.625.993	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 dokumen	384.399.300	efisiensi anggaran	
VI.3	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Jumlah dokumen pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	7 dokumen	0 dokumen	300.000.000	185.083.913	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	7 dokumen	338.794.000	Penambahan sarana prasarana	

VI.4	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang /Jasa	Jumlah pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	700 orang	1379 orang	1.209.187.000	776.105.813	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1500 orang	1.246.303.700	Penambahan kepesertaan sosbimtek	
VII	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Hubungan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan	100,00%	37,04%	10.006.795.993	4.665.539.701	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan	100%	10.450.795.993		
VII.1	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	27 laporan	10 laporan	10.006.795.993	4.665.539.701	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	27 laporan	10.450.795.993		
VII.2	Fasilitasi Keprotokolan	Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	11 laporan	4 laporan	423.451.200	138.600.000	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	11 laporan	423.451.200		
VII.3	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 laporan	5 laporan	8.971.796.793	4.495.539.701	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 laporan	9.371.796.793	Tambahan anggaran untuk Belanja Perjalanan Dinas dan Media	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Bagian Hubungan Masyarakat	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	4 laporan	1 laporan	611.548.000	31.400.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	4 laporan	655.548.000	Dianggarkan untuk Belanja Modal Alat Kantor	
VIII	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Umum	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	0,00%	28.614.493.553	10.935.082.685		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	28.812.743.553		
VIII.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bagian Umum	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	0,00%	26.359.493.553	9.977.371.611	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	26.557.743.553	-	
VIII.2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang/bulan	150 orang/bulan	26.196.583.036	9.962.468.391	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang/bulan	26.196.583.036	-	

VIII.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	0 laporan	162.910.517	14.903.220	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	361.160.517	penambahan anggaran untuk kegiatan bimtek penyusunan laporan keuangan	
VIII.4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Bagian Umum	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	80,00%	376.470.000	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	376.470.000	-	
VIII.5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Bagian Umum	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50 dokumen	0 dokumen	310.000.000	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50 dokumen	310.000.000	-	
VIII.6	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	0 laporan	50.000.000	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000	-	
VIII.7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	0 laporan	16.470.000	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	16.470.000	-	
VIII.8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bagian Umum	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	80,67%	242.740.000	75.820.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	322.740.000	-	
VIII.9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Bagian Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	2 paket	78.380.000	75.820.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	108.380.000	penambahan anggaran untuk pengadaan pakaian kattlepak	
VIII.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bagian Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 orang	0 orang	164.360.000	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 orang	214.360.000	penambahan anggaran untuk kegiatan perekrutan tenaga Non ASN tahun 2024	

VIII.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bagian Umum	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	63,96%	8.781.871.820	3.062.481.636	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	10.574.891.820	-	
VIII.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 paket	0 paket	250.230.000	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 paket	300.230.000	penambahan anggaran untuk belanja alat listrik di balaikota	
VIII.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	60 paket	330.000.000	313.850.110	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	459.000.000	penambahan anggaran untuk belanja alat tulis kantor, tinta dan toner untuk Sekretariat Daerah	
VIII.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bagian Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	25 paket	100.000.000	88.309.824	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	130.000.000	penambahan anggaran untuk belanja peralatan rumah tangga di balaikota	
VIII.15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bagian Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	2 paket	142.920.000	23.625.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	167.920.000	penambahan anggaran untuk belanja bahan kimia di balaikota	
VIII.16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bagian Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32 paket	30 paket	287.644.500	191.368.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32 paket	366.664.500	penambahan anggaran untuk belanja cetak kalender dinding dan duduk	
VIII.17	Penyediaan Bahan/Material	Bagian Umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 paket	9 paket	55.000.000	12.137.890	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 paket	85.000.000	penambahan anggaran untuk belanja material balaikota	
VIII.18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bagian Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	422 laporan	7.016.382.320	2.214.233.551	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1000 laporan	8.016.382.320	penambahan anggaran untuk belanja mamin rapat dan tamu Sekretariat Daerah	

VIII.19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	91 laporan	599.695.000	218.956.461	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	1.049.695.000	penambahan anggaran untuk belanja SPPD biasa dan luar negeri	
VIII.20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bagian Umum	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 %	66,67%	10.887.134.243	4.072.747.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 %	13.519.554.243	-	
VIII.21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	4 unit	4.023.700.000	3.154.820.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	4.473.700.000	penambahan anggaran untuk belanja kendaraan dinas operasional lapangan	
VIII.22	Pengadaan Mebel	Bagian Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	137 unit	856.947.200	185.806.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	70 unit	856.947.200	penambahan anggaran untuk belanja SPPD biasa dan luar negeri	
VIII.23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43 unit	4 unit	3.795.177.043	466.091.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43 unit	4.445.177.043	penambahan anggaran untuk belanja SPPD biasa dan luar negeri	
VIII.24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	3 unit	2.211.310.000	266.030.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	3.743.730.000	penambahan anggaran untuk belanja SPPD biasa dan luar negeri	
VIII.27	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	100%	12.977.141.617	3.313.176.316	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	15.145.391.617	-	
VIII.28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5 laporan	39.315.000	10.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	39.315.000	-	

VIII.29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	15 laporan	2.534.000.000	973.458.416	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	2.534.000.000	-	
VIII.30	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 laporan	66 laporan	6.471.800.000	691.895.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 laporan	7.976.050.000	penambahan anggaran untuk belanja jasa EO kegiatan dan EO acara insidentiiil	
VIII.31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bagian Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1116 laporan	464 laporan	3.932.026.617	1.637.022.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1116 laporan	4.596.026.617	penambahan anggaran untuk belanja jasa sewa kendaraan untuk sekda, asisten dan kabag	
VIII.32	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Umum	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	28,89%	5.720.693.462	1.807.051.980	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	7.939.693.462	-	
VIII.33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bagian Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	1 unit	145.876.450	32.230.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	285.876.450	penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas pejabat kdh dan wkdh	
VIII.34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bagian Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	42 unit	2.905.099.548	1.138.193.280	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	3.160.099.548	penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional	
VIII.35	Pemeliharaan Mebel	Bagian Umum	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	0 unit	105.920.000	-	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	155.920.000	penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan mebel	

VIII.36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	8 unit	3 unit	1.599.000.000	489.291.495	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	3.295.000.000	penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan gedung / bangunan	
VIII.37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	43 unit	680.872.464	71.052.080	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	680.872.464	-	
VIII.38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bagian Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	15 unit	283.925.000	76.285.125	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	361.925.000	penambahan anggaran untuk belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pada rumah jabatan kdh/wkdh	
VIII.39	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100%	100%	2.255.000.000	957.711.074	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100%	2.255.000.000	-	
VIII.40	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	1.255.000.000	461.380.074	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	1.255.000.000	-	
VIII.41	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	1.000.000.000	496.331.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	1.000.000.000	-	

VIII.42	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Persentase fasilitasi layanan kerumahtangaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100%	62,50%	4.131.710.928	1.523.765.349	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kerumahtangaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100%	5.422.210.928	-	
VIII.43	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	29 paket	24 paket	2.045.386.988	925.566.693	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	29 paket	3.090.886.988	penambahan anggaran untuk belanja rumah tangga kepala daerah	
VIII.44	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtangaan wakil kepala daerah	28 paket	15 paket	1.167.356.500	418.511.821	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtangaan wakil kepala daerah	28 paket	1.197.356.500	penambahan anggaran untuk belanja rumah tangga wakil kepala daerah	
VIII.45	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bagian Umum	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	6 paket	918.967.440	179.686.835	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	1.133.967.440	penambahan anggaran untuk belanja rumah tangga sekretariat daerah	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

TABEL
PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	TARGET INDIKATOR SASARAN 2023	KODE PROGRAM/ KEGIATAN				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET PROGRAM / KEGIATAN 2023	PAGU ANGGARAN (Rp.)			
											PADA APBD TA. 2023	URAIAN PERUBAHAN (PAGU INDIKATIF)	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10	11	
Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	82,05	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Ketercapaian SPM	3,000			-
				4	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	1 dokumen	30.000.000	30.000.000	-
								01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen	30.000.000	30.000.000	-
				4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Ketercapaian SPM	3,000			-
				4	01	01	2	01	Administrasi Tata pemerintahan	Jumlah dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	15 dokumen	1.582.837.795	1.543.764.595	(39.073.200)
				4	01	02	2	01.01	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi Walikota, Wakil Walikota dan anggota DPRD yang difasilitasi dan jumlah dokumen pelaksanaan hari jadi daerah	5 Dokumen	137.900.000,00	137.900.000	-

P.I-1-IV-2

				4	01	02	2	01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilyahan	Jumlah dokumen administrasi kewilyahan	5 dokumen	980.058.800,00	980.058.800,00	-
				4	01	02	2	01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	464.878.995,00	425.805.795,00	(39.073.200)
				4	01	02	2	04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 dokumen	144.698.800	183.772.000	39.073.200
				4	01	02	2	04.01	Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	Jumlah dokumen fasilitasi kerja sama daerah dalam negeri	20 dokumen	144.698.800	183.772.000	39.073.200
				4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	15.595.300.000	15.595.300.000	-
				4	01	02	2	02	Pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	17 dokumen	15.595.300.000	15.595.300.000	-
				4	01	02	2	02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	7 dokumen	4.979.300.000,00	4.979.300.000,00	-
				4	01	02	2	02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen evaluasi dan kebijakan Kesejahteraan sosial	4 dokumen	4.649.640.000,00	4.649.640.000,00	-
				4	01	02	2	02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen evaluasi dan kebijakan Kesejahteraan masyarakat	6 dokumen	5.966.360.000,00	5.966.360.000,00	-
				4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pengembangan kebijakan bidang hukum yang ditindaklanjuti	100%	3.366.977.434	3.966.977.434	600.000.000

P.I-1-IV-3

Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan dibagi jumlah produk hukum yang diusulkan oleh perangkat daerah x 100%	95%	4	01	02	2	03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku	10 dokumen	3.366.977.434	3.966.977.434	600.000.000
				4	01	02	2	03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	595 dokumen	1.119.280.000,00	1.319.280.000,00	200.000.000
				4	01	02	2	03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	43 kasus	1.403.967.434,00	1.803.967.434,00	400.000.000
				4	01	02	2	03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	6 dokumen	843.730.000,00	843.730.000,00	-
Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100%	993.074.000	1.394.970.905	401.896.905
				4	01	03	2	01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen pengembangan kebijakan bidang perekonomian	2 Dokumen	800.144.000	820.144.000	20.000.000
				4	01	03	2	01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	308.321.700	308.321.700	-
				4	01	03	2	01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 dokumen	491.822.300	511.822.300	20.000.000
				4	01	03	2	02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program PI yang difasilitasi	1 Dokumen	96.970.000	96.970.000	-

P.I-1-IV-4

			4	01	03	2	02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	96.970.000	96.970.000	-	
			4	01	03	2	04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA	2 Dokumen	95.960.000	477.856.905	381.896.905	
			4	01	03	2	04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	0	281.896.905	281.896.905	
			4	01	03	2	04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 dokumen	95.960.000	195.960.000	100.000.000	
Meningkatnya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kota Malang	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase paket selesai tender	100%	4	01	03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase paket selesai tender	95%	1.969.497.000	1.969.497.000	-	
				4	01	03	2	03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan	100%	1.969.497.000	1.969.497.000	-
				4	01	03	2	03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	200 dokumen	460.310.000,00	384.399.000,00	(75.911.000)
				4	01	03	2	03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	7 dokumen	300.000.000,00	358.440.000,00	58.440.000

P.I-1-IV-5

				4	01	03	2	03.03	Pembinaan dan advokasi PBJ	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi PBJ	700 orang	1.209.187.000,00	1.226.658.000,00	17.471.000
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Hasil Survei Internal Organisasi	2,3	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Hasil Survei Internal Organisasi	2,3			-
Meningkatnya kualitas manajemen ASN		Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah	44											
				4	01	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setda	1 dokumen	104.471.400	104.471.400	-
				4	01	01	2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	104.471.400	104.471.400	-
				4	01	01	2	13	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kebijakan pengembangan kinerja dan pelayanan publik	15 dokumen	1.315.924.700	1.315.924.700	-
				4	01	01	2	13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3 dokumen	336.909.100	336.909.100	-
				4	01	01	2	13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	5 laporan	55.989.000	55.989.000	-
				4	01	01	2	13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	3 dokumen	547.138.600	547.138.600	-
				4	01	01	2	13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	3 dokumen	263.028.500	263.028.500	-
				4	01	01	2	13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	1 dokumen	112.859.500	112.859.500	-

P.I-1-IV-6

Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan				4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan	100,00%	10.006.795.993	10.450.795.993	444.000.000
				4	01	01	2	14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	27 laporan	10.006.795.993	10.450.795.993	444.000.000
				4	01	01	2	14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	700 layanan	423.451.200,00	423.451.200	-
				4	01	01	2	14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	12 laporan	8.971.796.793,00	9.415.796.793	444.000.000
				4	01	01	2	14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	4 laporan	611.548.000,00	611.548.000	-
Meningkatnya kinerja pelayanan Sekretariat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	91,25	4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			71.732.255.623	81.602.568.457	9.870.312.834
										Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100,00%	28.614.493.553	28.406.670.731	(207.822.822)
										Nilai survey kepuasan internal	80,00	26.133.464.365	32.434.802.681	6.301.338.316
										Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80,00%	16.984.297.705	20.761.095.045	3.776.797.340
				4	01	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	100 %	26.359.493.553	26.151.670.731	(207.822.822)
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 orang / bulan	26.196.583.036	25.866.180.214	(330.402.822)
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	162.910.517	285.490.517	122.580.000

P.I-1-IV-7

					03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terinventarisir	100 %	376.470.000	426.470.000	50.000.000
					03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50 dokumen	310.000.000	310.000.000	-
					03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	50.000.000	100.000.000	50.000.000
					03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	16.470.000	16.470.000	-
					05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian	100 %	242.740.000	423.150.000	180.410.000
					05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	78.380.000	119.280.000	40.900.000
					05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 orang	164.360.000	303.870.000	139.510.000
					06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi	100 %	8.781.871.820	10.639.115.136	1.857.243.316
					06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 paket	250.230.000	300.230.000	50.000.000
					06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	330.000.000	459.000.000	129.000.000
					06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	100.000.000	130.000.000	30.000.000

P.I-1-IV-8

				06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 paket	142.920.000	128.193.300	(14.726.700)
				06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	32 paket	287.644.500	366.664.500	79.020.000
				06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 paket	55.000.000	85.000.000	30.000.000
				06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1000 laporan	7.016.382.320	8.070.332.336	1.053.950.016
				06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 laporan	599.695.000	1.099.695.000	500.000.000
				07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD	80 %	10.887.134.243	12.057.264.243	1.170.130.000
				07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	4.023.700.000	3.461.460.000	(562.240.000)
				07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	856.947.200	856.947.200	-
				07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	43 unit	3.795.177.043	4.517.017.043	721.840.000
				07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 unit	2.211.310.000	3.221.840.000	1.010.530.000
				08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti	100%	12.977.141.617	14.980.536.617	2.003.395.000
				08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	39.315.000	18.430.000	(20.885.000)

P.I-1-IV-9

				08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	2.534.000.000	2.384.000.000	(150.000.000)
				08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	200 laporan	6.471.800.000	7.982.080.000	1.510.280.000
				08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1116 laporan	3.932.026.617	4.596.026.617	664.000.000
					Penyediaan jasa umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		3.932.026.617	4.703.703.085	771.676.468
				09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	80%	5.720.693.462	8.277.360.802	2.556.667.340
				09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	145.876.450	184.376.450	38.500.000
				09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 unit	2.905.099.548	3.500.000.000	594.900.452
				09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 unit	105.920.000	205.920.000	100.000.000
				09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	1.599.000.000	3.320.436.888	1.721.436.888
				09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 unit	680.872.464	688.722.464	7.850.000

P.I-1-IV-10

				09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 unit	283.925.000	377.905.000	93.980.000
				11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu	100%	2.255.000.000	2.255.000.000	-
				11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang / bulan	1.255.000.000	1.255.000.000	-
				11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang / bulan	1.000.000.000	1.000.000.000	-
				12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100%	4.131.710.928	6.392.000.928	2.260.290.000
				12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	29 paket	2.045.386.988	3.110.886.988	1.065.500.000
				12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtanggaan wakil kepala daerah	28 paket	1.167.356.500	1.197.356.500	30.000.000
				12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	918.967.440	2.083.757.440	1.164.790.000

BAB IV
PENUTUP

Dalam kurun waktu tahun 2023, Sekretariat Daerah Kota Malang akan melaksanakan 3 (tiga) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) subkegiatan. Guna menunjang keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, direncanakan penganggaran pada Sekretariat Daerah Kota Malang sebesar Rp 71.732.255.623,00 (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang tahun 2023. Setelah dilaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang tahun 2023, anggaran yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Malang adalah sebesar Rp 81.693.774.925,00 (delapan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).

Apabila dalam pelaksanaannya anggaran yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan, tetap akan dilaksanakan semaksimal mungkin.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Malang ini merupakan operasionalisasi visi, misi, dan strategi Sekretariat Daerah Kota Malang sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetap dilaksanakan dengan melibatkan instansi vertikal, Perangkat Daerah terkait serta masyarakat yang diberikan pelayanan.

